

sebuah bank yang bertujuan untuk menarik dana masyarakat melalui tabungan. Usaha pemerintah Jepang ini tidak sukses karena dilakukan dengan paksaan. Bank tersebut hanya didirikan di daerah Yogyakarta.

Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 telah memberikan inspirasi kepada Bapak Darmosoetanto untuk memprakarsai pengambil alihan TYOKIN KYOKU dari pemerintahan Jepang ke RI dan terjadilah penggantian nama menjadi KANTOR TABUNGAN POS. Bapak Darmosoetanto ditetapkan oleh pemerintah RI menjadi Direktur yang pertama. Tugas pertama KANTOR TABUNGAN NEGARA adalah melakukan penukaran uang Jepang dengan uang Indonesia (ORI). Tetapi kegiatan KANTOR TABUNGAN POS diganti menjadi BANK TABUNGAN POS RI, lembaga ini bernaung dibawah Kementerian Perhubungan.

Banyak kegiatan bernilai sejarah sejak tahun 1950 tetapi yang substantif bagi sejarah BTN adalah dikeluarkan UU Darurat No. 9 tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950 yang mengubah nama "POSTSPARBANKIN INDONESIA" berdasarkan Staatsblad No 295 tahun 1941 menjadi BANK TABUNGAN POS dan memindahkan induk kementerian dari Kementerian Perhubungan ke Kementerian Keuangan dibawah menteri Urusan Bank Sentral. Walaupun dengan UU Darurat tersebut masih bernama BANK TABUNGAN POS, tetapi tanggal 9 Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan tanggal lahir Bank Tabungan Negara. Nama Bank Tabungan Pos menurut UU Darurat tersebut dikukuhkan dengan UU No. 36 tahun 1953 tanggal

18 Desember 1953. Perubahan nama dari BANK TABUNGAN POS menjadi BANK TABUNGAN NEGARA didasarkan pada PERPU No. 4 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963 yang kemudian dikuatkan dengan UU No. 2 tahun 1964 tanggal 25 Mei 1964.

Penegasan status BANK TABUNGAN NEGARA sebagai bank milik negara ditetapkan dengan UU No. 20 tahun 1968 tanggal 19 Desember 1968 yang sebelumnya (Sejak Tahun 1964) BANK TABUNGAN NEGARA menjadi BI unit V. Jika tugas utama saat pendirian POSTPAARBANK (1897) sampai dengan BANK TABUNGAN NEGARA (1968) tuadalah bergerak dalam lingkup penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan, maka sejak tahun 1974 BANK TABUNGAN NEGARA ditambah tugas memberikan pelayanan KPR dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR terjadi pada 10 Desember 1976.

Bentuk hukum Bank Tabungan Negara mengalami perubahan lagi pada tahun 1992, yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 24 tahun 29 April 1992 yang merupakan pelaksanaan dari UU No.7 tahun 1992 bentuk hukum Bank Tabungan Negara berubah menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan call name bank BTN.

7. Kantor Kas Atom
Jalan Bunguran Nomor 45, Surabaya
8. Kantor Kas Demak
Jalan Kalibutih Nomor 41, Surabaya
9. Kantor Kas Perak Barat
Jalan Perak Barat 217 A, Surabaya
10. Kantor Kas Gubeng
Jalan Karimun Jawa kav 6, Surabaya
11. Kantor Kas Kertajaya
Jalan Raya Kertajaya Nomor 60 C, Surabaya
12. Kantor Kas Dharmahusada
Jalan Dharmahusada Nomor 199 C, Surabaya
13. Kantor Kas Ngagel
Jalan Ngagel Raya Blok G Nomor 9, Surabaya
14. Kantor Kas Klampis Jaya
Jalan Raya Klampisan Nomor 45 C, Surabaya
15. Kantor Kas Nginden Semolo
Jalan Nginden Semolo Nomor 101 Kav 40, Surabaya
16. Kantor Kas Pasar Kembang
Jalan Pasar Kembang, Ruko Grand Flower Blok 1 Nomor 4,
Surabaya
17. Kantor Kas Darmo
Jalan Raya Darmo Nomor 123-128, Surabaya

